



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 700/Kep.861-Inspektorat/2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai, efektif, efisien, ekonomis, dan taat peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan visi misi Bupati Majalengka, perlu dilaksanakan pengawasan yang sistematis;
- b. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan potensi kegagalan terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2021, perlu dilakukan pengawasan berbasis risiko;
- c. bahwa untuk memanage sekecil mungkin risiko kegagalan dan kendala-kendala yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah dan desa, perlu diselenggarakan konsulting sebagai upaya penjaminan dan deteksi dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta guna mewujudkan efektifitas, sinergitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang 3

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
38. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Teknis Operasional Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Inspektur Kabupaten Majalengka melaporkan secara berkala pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 700/Kep.861-Inspektorat/2020

Tanggal : 8 Desember 2020

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021.

POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan visi misi dan program prioritas Bupati Majalengka dan penanganan/penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang sangat berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial hingga perlambatan ekonomi dan penurunan pendapatan nasional, yang telah ditetapkan sebagai Darurat Nasional Kesehatan Masyarakat, dan diperkirakan masih belum akan berakhir hingga Tahun 2021 sehingga masih harus dilakukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Lembaga Daerah dan instansi lainnya serta terkait efektifitas efisien, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dalam penggunaan anggaran.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penggunaan anggaran dimaksud telah efektif efisien, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sasaran pembinaan pengawasan dimaksud adalah Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Majalengka ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

II. VISI DAN MISI

2.1. Visi

Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode Tahun 2018-2023 memiliki visi RAHARJA yaitu mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA pada tahun 2023. secara epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Sindangkasih Sugih Mukti Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah (Bagja) sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Religius

Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

b. Adil

Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tenang, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial.

c. Harmonis

Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan.

d. Sejahtera

Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

2.2. Misi

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tenang dan tertib di masyarakat.

3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanam modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis dan melayani.
5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.3 Program dan Prioritas Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi.
5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industri.
6. Mewujudkan kemandirian desa.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

3.1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pemeriksaan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang keuangan dan aset.

3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan program pengawasan dan fasilitasi pemeriksaan yang meliputi urusan pemerintahan, pemerintahan desa, BUMD/Perusahaan Daerah;

2. penyelenggaraan urusan pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi, urusan pemerintahan, pemerintahan desa, BUMD/Perusahaan Daerah;
3. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten;
4. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan desa;
5. pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi urusan atas pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang keuangan dan aset;
6. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi tersebut diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b) Review Laporan Kinerja;
 - c) Review Laporan Keuangan;
 - d) Pengawasan Desa;
 - e) Kerjasama Pengawasan Internal;
 - f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - i. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - ii. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - iii. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

3.3. Program Dan Prioritas Pengawasan Tahun Anggaran 2021

3.3.1. Kebijakan Umum Pengawasan Tahun Anggaran 2021

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi mengacu pada perjanjian kerja sama Bupati Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, dan Kepolisian Resor Majalengka.
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
3. Dana Desa:
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa bahwa pengelolaan dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bantuan operasional sekolah (BOS):
Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah bahwa pengelolaan dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi
 - a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen bahwa benar akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

7. Penegakan Integritas

a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

8. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

a. Penerapan Manajemen Risiko dan Prioritas;

b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Prioritas;

c. Audit Kinerja;

d. Audit Investigasi;

e. Pemeriksaan DAK Fisik;

f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD; dan

g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- 3.4. Koordinasi
1. Secara Internal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait baik dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pengawasan.
 2. Secara Eksternal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya terutama dalam rangka sinergitas penyusunan PKPT, PK APIP, Pemantauan Tindak Lanjut, serta penanganan pemeriksaan tujuan tertentu sebagai pelimpahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah pusat yang ada di daerah agar terdapat penjaminan mutu atas proses metoda dan hasil pemeriksaan.

IV. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah dalam hal :

1. Memberikan penjaminan;
2. Deteksi dini terhadap potensi risiko ketidaktercapaian target kinerja dan potensi tindak pidana korupsi ; dan
3. Konsulting.

B. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan memberikan penjaminan :

1) Pemeriksaan/Audit Kinerja, yaitu :

- a. Menilai efektifitas;
- b. Menilai efesiensi;
- c. Menilai ekonomis;
- d. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2) Pemeriksaan/Audit ketaatan yaitu Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3) *Post Audit* yaitu memeriksa/mengaudit pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, yang mencakup 4 aspek :

- a. Aspek Kebijakan;
- b. Aspek Kelembagaan;
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Aset.

4) *Current Audit* yaitu memeriksa/mengaudit pelaksanaan tahun anggaran berjalan yang mencakup :

- a. Aspek Kebijakan;
- b. Aspek Kelembagaan;
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Aset.

5) Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu/Investigasi yaitu

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan terhadap :

- a. Penanganan pengaduan masyarakat;
- b. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- e. Pelanggaran disiplin pegawai.

6) Kegiatan Reviu :

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik; dan
 - e. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan anggaran bantuan keuangan Provinsi.
- 7) Kegiatan Evaluasi :
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :
- a. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- 8) Kegiatan Monitoring dilaksanakan terhadap PBB.
2. Arah Kebijakan deteksi dini meliputi:
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi bidang pengawasan;
 - 2) Penguatan SPIP;
 - 3) Pengawasan dengan tujuan tertentu (*Probitiy Audit*).
3. Konsulting
- 1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut;
 - 2) *Clinic Working* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

V. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

1. Sasaran

- a. Menilai efektif, efisien, ekonomis terhadap sembilan program prioritas Bupati;
- b. Menilai ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Mendeteksi kelemahan sistem pengendali intern;
- d. Mendeteksi adanya kecurangan dan ketidakpatutan;
- e. Mendeteksi risiko penyebab kegagalan pencapaian target kinerja; dan
- f. Pengawasan tujuan tertentu terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan Negara/Daerah.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pemeriksaan terdiri dari :

- A. Aspek Keuangan;
- B. Manajemen Operasional Audit;
- C. Administrasi Audit.

VI. OBYEK PEMERIKSAAN

Sesuai dengan sasaran kebijakan pelaksanaan pengawasan, objek pengawasan (auditan) dalam Pemeriksaan Internal Secara Berkala, menggunakan metode berbasis resiko dengan mempertimbangkan pencapaian program prioritas yang tercantum dalam IKU, besaran anggaran, sebaran kegiatan/pelayanan, sebagai bahan pelaksanaan hari pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

A. Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga
7. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Sosial
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
14. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
17. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Sekretariat Daerah
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Pendapatan Daerah
30. Kecamatan Majalengka
31. Kecamatan Kadipaten
32. Kecamatan Jatiwangi

33. Kecamatan Dawuan
34. Kecamatan Jatitujuh
35. Kecamatan Ligung
36. Kecamatan Leuwimunding
37. Kecamatan Rajagaluh
38. Kecamatan Maja
39. Kecamatan Talaga
40. Kecamatan Cikijing
41. Kecamatan Bantarujeg
42. Kecamatan Sukahaji
43. Kecamatan Sumberjaya
44. Kecamatan Lemahsugih
45. Kecamatan Argapura
46. Kecamatan Kertajati
47. Kecamatan Panyingkiran
48. Kecamatan Palasah
49. Kecamatan Cigasong
50. Kecamatan Sindangwangi
51. Kecamatan Banjaran
52. Kecamatan Cingambul
53. Kecamatan Kasokandel
54. Kecamatan Sindang
55. Kecamatan Malausma

B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):

Inspektorat Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas perintah pemilik perusahaan daerah dimaksud yaitu Bupati sebagai pemilik untuk menilai sampai sejauh mana *Return On Investment* (ROI) yaitu:

1. Perusahaan Daerah Air Minum
2. Perumda Silih Asih
3. Perumda BPR Majalengka
4. PD. Sindangkasih Multi Usaha

C. Pemerintah Desa

Jumlah Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka Sebanyak 330, Obyek Pemeriksaan Pemerintah Desa pada Tahun 2021 sebanyak 189. Pemeriksaan terhadap 127 Desa dilaksanakan post audit, 62 Desa *Current* Audit. Penunjukan Obyek pemeriksaan Desa tersebut dengan mempertimbangkan risiko:

1. Menjelang habis masa jabatan Kepala Desa;
2. Adanya perubahan para Perangkat Desa;
3. Pertanggungjawaban aset Desa;
4. Proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Kondusifitas;

Hal tersebut sebagaimana dilampirkan dalam (Lampiran III).

Sedangkan untuk 141 Desa tidak menjadi obyek pemeriksaan dengan alasan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan *Post Audit Tahun 2020*;
2. Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Majalengka.

VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN PELAPORAN

a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Temuan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terhadap temuan yang bersifat tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis dalam penyelenggaraan Sembilan program prioritas Bupati diberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas penyelenggara program dimaksud dan kepada entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi.
2. Terhadap temuan yang bersifat ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan diberikan rekomendasi pembinaan dan atau sanksi yang wajib ditindaklanjuti oleh atasan langsung dan entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi.
3. Terhadap temuan yang bersifat kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diberikan rekomendasi berupa teguran dan penilaian kepada pimpinan entitas audit.
4. Terhadap temuan yang bersifat kecurangan, ketidakpatutan yang berpotensi merugikan keuangan Negara diberikan rekomendasi sanksi oleh pejabat dan entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi serta mengembalikan kerugian keuangan Negara.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Desa selaku Entitas wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait Keuangan Negara maka Inspektorat Kabupaten menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan status tindak lanjut atau menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

b. Pelaporan

Setiap kegiatan Pengawasan akan di evaluasi dengan cermat terutama yang berkaitan dengan kinerja dan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Daerah, untuk itu Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada :

1. Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja disampaikan kepada Bupati dan entitas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Laporan Hasil Pengawasan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Bupati.
3. Laporan Hasil Pemutahiran Data/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan diajukan kepada Bupati dan Pejabat yang terkait.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

VIII. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 700/861-Inspektorat/2020
 Tanggal : 8 Desember 2020
 Tentang: PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2021.

A. JADWAL PEMERIKSAAN/ POST AUDIT

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I	POST AUDIT PADA PEMERINTAHAN DESA TA 2021								
1	DESA CIJUREY KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DESA PASIRMUNCANG KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DESA BANTRANGSANA KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	DESA JATISERANG KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DESA BONANG KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DESA PANYINGKIRAN KEC. PANYINGKIRAN	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	DESA KARANGSAMBUNG KEC. KADIPATEN	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DESA MANDAPA KEC. DAWUAN	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DESA KARANGANYAR KEC. DAWUAN	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DESA SALAWANA KEC. DAWUAN	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DESA JATISAWIT KEC. KASOKANDEL	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DESA RANJI KULON KEC. KASOKANDEL	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DESA GUNUNGSARI KEC. KASOKANDEL	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DESA KASOKANDEL KEC. KASOKANDEL	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DESA GIRIMUKTI KEC. KASOKANDEL	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	DESA WANAJAYA KEC. KASOKANDEL	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
17	DESA SUKAWANA KEC. KERTAJATI	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DESA PASIR IPIS KEC. KERTAJATI	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DESA MEKARMULYA KEC. KERTAJATI	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DESA JATITUJUH KEC. JATITUJUH	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	DESA PANGKALAN PARI KEC. JATITUJUH	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	DESA RANDEGAN KULON KEC. JATITUJUH	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	DESA BABAKAN KAREO KEC. RAJAGALUH	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	DESA SINDANGPANO KEC. RAJAGALUH	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	DESA RAJAGALUH KIDUL KEC. RAJAGALUH	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	DESA SINGAWADA KEC. RAJAGALUH	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	DESA CISETU KEC. RAJAGALUH	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	DESA BANTARAGUNG KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	DESA PADAHERANG KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
30	DESA LENGKONG KULON KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
31	DESA JEURUK LEUEUT KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
32	DESA SINDANGWANGI KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
33	DESA BUAH KAPAS KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
34	DESA LEUWILAJA KEC. SINDANGWANGI	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
35	DESA PARAKAN KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
36	DESA LAME KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
37	DESA RAJAWANGI KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
38	DESA CIPARAY KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
39	DESA KARANGASEM KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
40	DESA TANJUNGSARI KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
41	DESA PARUNGJAYA KEC. LEUWIMUNDING	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
42	DESA BONGAS WETAN KEC. SUMBERJAYA	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
43	DESA BANJARAN KEC. SUMBERJAYA	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
44	DESA PANINGKIRAN KEC. SUMBERJAYA	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
45	DESA PARAPATAN KEC. SUMBERJAYA	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
46	DESA PANALIN KIDUL KEC. SUMBERJAYA	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
47	DESA CIBOGOR KEC. LIGUNG	Tinggi	1 s.d 2 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
48	DESA TEGAL AREN KEC. LIGUNG	Tinggi	1 s.d 2 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
49	DESA AMPEL KEC. LIGUNG	Tinggi	3 s.d 4 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
50	DESA BANTARWARU KEC. LIGUNG	Tinggi	3 s.d 4 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
51	DESA MAJASARI KEC. LIGUNG	Tinggi	8 s.d 9 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
52	DESA KEDUNGKENCANA KEC. LIGUNG	Tinggi	8 s.d 9 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
53	DESA LIGUNG LOR KEC. LIGUNG	Tinggi	10 s.d 15 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
54	DESA SUKAWERA KEC. LIGUNG	Tinggi	10 s.d 15 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
55	DESA GANDAWESI KEC. LIGUNG	Tinggi	16 s.d 17 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
56	DESA KEDUNGSARI KEC. LIGUNG	Tinggi	16 s.d 17 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
57	DESA CISAMBENG KEC. PALASAH	Tinggi	18 s.d 22 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
58	DESA PALASAH KEC. PALASAH	Tinggi	18 s.d 22 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
59	DESA TARIKOLOT KEC. PALASAH	Tinggi	23 s.d 24 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
60	DESA KRAMAT KEC. PALASAH	Tinggi	23 s.d 24 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
61	DESA KAWUNGHILIR KEC. CIGASONG	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
62	DESA NANGGEWER KEC. SUKAHAJI	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
63	DESA SINDANG KEC. SINDANG	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
64	DESA GUNUNG KUNING KEC. SINDANG	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
65	DESA BAYUREJA KEC. SINDANG	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
66	DESA CENGAL KEC. MAJA	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
67	DESA ANGGRAWATI KEC. MAJA	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
68	DESA CIPICUNG KEC. MAJA	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
69	DESA MALONGPONG KEC. MAJA	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
70	DESA TEGALSARI KEC. MAJA	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
71	DESA SINDANGKERTA KEC. MAJA	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
72	DESA CICALUNG KEC. MAJA	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
73	DESA SAGARA KEC. ARGAPURA	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
74	DESA CIBUNUT KEC. ARGAPURA	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
75	DESA HAURSEAH KEC. ARGAPURA	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
76	DESA SUNIA KEC. BANJARAN	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
77	DESA DARMALARANG KEC. BANJARAN	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
78	DESA SINDANGPALA KEC. BANJARAN	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
79	DESA BANJARAN KEC. BANJARAN	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
80	DESA KAGOK KEC. BANJARAN	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
81	DESA CIMEONG KEC. BANJARAN	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
82	DESA PANYINDANGAN KEC. BANJARAN	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
83	DESA KAREO KEC. BANJARAN	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
84	DESA GIRIMULYA KEC. BANJARAN	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
85	DESA CIPASUNG KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
86	DESA LEMAHPUTIH KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	18 s.d. 19 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
87	DESA PADAREK KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
88	DESA CIGALEUH KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	20 s.d. 21 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
89	DESA SUKAJADI KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
90	DESA SUKAMAJU KEC. LEMAHSUGIH	Tinggi	25 s.d. 26 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
91	DESA WERASARI KEC. MALAUSMA	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
92	DESA LEBAKWANGI KEC. MALAUSMA	Tinggi	27 s.d. 28 Januari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
93	DESA CIMUNCANG KEC. MALAUSMA	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
94	DESA BUNINAGARA KEC. MALAUSMA	Tinggi	1 s.d. 2 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
95	DESA JAGAMULYA KEC. MALAUSMA	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
96	DESA GIRIMUKTI KEC. MALAUSMA	Tinggi	3 s.d. 4 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
97	DESA CIMANGGUNGHIR KEC. BANTARUJEG	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
98	DESA SALAWANGI KEC. BANTARUJEG	Tinggi	8 s.d. 9 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
99	DESA GUNUNGLARANG KEC. BANTARUJEG	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
100	DESA CIKIDANG KEC. BANTARUJEG	Tinggi	10 s.d. 11 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	lrbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
101	DESA SUKAMENAK KEC. BANTARUJEG	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
102	DESA WADOWETAN KEC. BANTARUJEG	Tinggi	15 s.d. 16 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
103	DESA SILIHWANGI KEC. BANTARUJEG	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
104	DESA SINDANGHURIP KEC. BANTARUJEG	Tinggi	17 s.d. 18 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
105	DESA LAMPUYANG KEC. TALAGA	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
106	DESA CIKEUSAL KEC. TALAGA	Tinggi	22 s.d. 23 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
107	DESA CICANIR KEC. TALAGA	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
108	DESA CAMPAGA KEC. TALAGA	Tinggi	24 s.d. 25 Februari 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
109	DESA TALAGA WETAN KEC. TALAGA	Tinggi	1 s.d 2 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
110	DESA SALADO KEC. TALAGA	Tinggi	1 s.d 2 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
111	DESA GUNUNG MANIK KEC. TALAGA	Tinggi	3 s.d 4 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
112	DESA CIKIJING KEC. CIKIJING	Tinggi	3 s.d 4 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
113	DESA SINDANG KEC. CIKIJING	Tinggi	8 s.d 9 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
114	DESA BANJARANSARI KEC. CIKIJING	Tinggi	8 s.d 9 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
115	DESA KASTURI KEC. CIKIJING	Tinggi	10 s.d 15 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
116	DESA CIDULANG KEC. CIKIJING	Tinggi	10 s.d 15 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
117	DESA CIPULUS KEC. CIKIJING	Tinggi	16 s.d 17 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
118	DESA CIKONDANG KEC. CINGAMBUL	Tinggi	16 s.d 17 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
119	DESA CIRANJENG KEC. CINGAMBUL	Tinggi	18 s.d 22 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
120	DESA KONDANGMEKAR KEC. CINGAMBUL	Tinggi	18 s.d 22 Maret 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

B. JADWAL PEMERIKSAAN/ AUDIT OPERASIONAL

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
II CURRENT AUDIT PEMERINTAHAN DESA TA 2021									
1	DESA KARYAMUKTI KEC. PANYINGKIRN	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DESA HEULEUT KEC. KADIPATEN	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DESA LIANG JULANG KEC. KADIPATEN	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	DESA PAGANDON KEC. KADIPATEN	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DESA CIPAKU KEC. KADIPATEN	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DESA GENTENG KEC. DAWUAN	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	DESA BOJONG CIDERES KEC. DAWUAN	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DESA SINARJATI KEC. DAWUAN	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DESA PASIRMALATI KEC. DAWUAN	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DESA BATURUYUK KEC. DAWUAN	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DESA KERTASARI KEC. KERTAJATI	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DESA PAKUBEUREUM KEC. KERTAJATI	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DESA PANYINGKIRAN KEC. JATITUJUH	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DESA PILANGSARI KEC. JATITUJUH	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DESA TEJA KEC. RAJAGALUH	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	DESA PAYUNG KEC. RAJAGALUH	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
17	DESA CIPINANG KEC. RAJAGALUH	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DESA UJUNG BERUNG KEC. SINDANGWANGI	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DESA LENGKONG WETAN KEC. SINDANGWANGI	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DESA NANGGERANG KEC. LEUWIMUNDING	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	DESA MINDI KEC. LEUWIMUNDING	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	DESA LOJIKOBONG KEC. SUMBERJAYA	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	DESA PANJALIN LOR KEC. SUMBERJAYA	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	DESA WERAGATI KEC. PALASAH	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	DESA BURUJUL KULON KEC. JATIWANGI	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	DESA CIBENTAR KEC. JATIWANGI	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	DESA CIBORELANG KEC. JATIWANGI	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	DESA SUTAWANGI KEC. JATIWANGI	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	DESA JATIWANGI KEC. JATIWANGI	Sedang	28 Okt s.d 1 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
30	DESA BEBER KEC. LIGUNG	Sedang	28 Okt s.d 1 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
31	DESA BUNTU KEC. LIGUNG	Sedang	2 s.d 3 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
32	DESA LIGUNG KEC. LIGUNG	Sedang	2 s.d 3 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
33	DESA LEUWEUNGHAPIT KEC. LIGUNG	Sedang	4 s.d 8 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
34	DESA KODASARI KEC. LIGUNG	Sedang	4 s.d 8 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
35	DESA KAWUNGGIRANG KEC. MAJALENGKA	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
36	DESA CIBODAS KEC. MAJALENGKA	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
37	DESA TENJOLAYAR KEC. CIGASONG	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
38	DESA KUTAMANGGU KEC. CIGASONG	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
39	DESA CIOMAS KEC. SUKAHAJI	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
40	DESA CIKEUSIK KEC. SUKAHAJI	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
41	DESA PALABUAN KEC. SUKAHAJI	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
42	DESA CIKALONG KEC. SUKAHAJI	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
43	DESA CANDRAJAYA KEC. SUKAHAJI	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
44	DESA SANGKAN HURIP KEC. SINDANG	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
45	DESA PASANGRAHAN KEC. MAJA	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
46	DESA CIEURIH KEC. MAJA	Sedang	21 s.d 25 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
47	DESA KERTABASUKI KEC. MAJA	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
48	DESA MAJA SELATAN KEC. MAJA	Sedang	26 s.d 27 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
49	DESA NUNUK BARU KEC. MAJA	Sedang	28 Okt s.d 1 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
50	DESA SUKASARI KALER KEC. ARGAPURA	Sedang	28 Okt s.d 1 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Nama Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
51	DESA GUNUNG WANGI KEC. ARGAPURA	Sedang	2 s.d 3 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
52	DESA ARGALINGGA KEC. ARGAPURA	Sedang	2 s.d 3 Nop 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
53	DESA SADAWANGI KEC. LEMAH SUGIH	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
54	DESA CINAMBO KEC. BANTARUJEG	Sedang	4 s.d 5 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
55	DESA BABAKAN SARI KEC. BANTARUJEG	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
56	DESA SUKADANA KEC. MALAUSMA	Sedang	6 s.d 7 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
57	DESA CIRANCA KEC. MALAUSMA	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
58	DESA SUKAPERNA KEC. TALAGA	Sedang	11 s.d 12 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
59	DESA KERTARAHAYU KEC. TALAGA	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
60	DESA NAGARAKEMBANG KEC. CINGAMBUL	Sedang	13 s.d 14 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
61	DESA WANGKELANG KEC. CINGAMBUL	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
62	DESA RAWA KEC. CINGAMBUL	Sedang	18 s.d 20 Oktober 2021	1 Ketim,3 anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBĀHI

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 700/861-Inspektorat/2020
 Tanggal : 8 Desember 2020
 Tentang: PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2021.

JADWAL AUDIT KINERJA

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Satker/Perusda	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PERANGKAT DAERAH									
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tinggi	6	26-04-2021 s/d 04-05-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DINAS SOSIAL	Tinggi	6	24-05-2021 s/d 07-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Tinggi	6	08-06-2021 s/d 16-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tinggi	6	17-06-2021 s/d 28-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Tinggi	7	29-06-2021 s/d 08-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD			Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tinggi	7	12-07-2021 s/d 22-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Tinggi	12	26-07-2021 s/d 16-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tinggi	6	28-04-2021 s/d 06-05-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tinggi	6	25-05-2021 s/d 07-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DINAS PERHUBUNGAN	Tinggi	6	08-06-2021 s/d 16-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tinggi	6	17-06-2021 s/d 28-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tinggi	6	29-06-2021 s/d 07-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Sangat Tinggi	16	08-07-2021 s/d 05-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	Tinggi	6	09-08-2021 s/d 19-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DINAS KESEHATAN	Sangat Tinggi	15	10-05-2021 s/d 08-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	RSUD CIDERES	Tinggi	6	9-06-2021 s/d 17-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	RSUD MAJALENGKA	Tinggi	6	21-06-2021 s/d 29-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Tinggi	6	30-06-2021 s/d 07-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Tinggi	6	08-07-2021 s/d 15-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tinggi	6	19-07-2021 s/d 27-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Sedang	4	28-07-2021 s/d 03-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	SEKRETARIAT DPRD	Tinggi	6	26-05-2021 s/d 04-05-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sedang	4	05-05-2021 s/d 11-05-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Satker/Perusda	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	SEKRETARIAT DAERAH	Sangat Tinggi	12	24-05-2021 s/d 18-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tinggi	6	17-06-2021 s/d 28-06-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tinggi	8	29-08-2021 s/d 12-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tinggi	6	13-07-2021 s/d 22-07-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tinggi	8	26-07-2021 s/d 05-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sedang	5	09-08-2021 s/d 18-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
II KECAMATAN										
1	KECAMATAN PANYINGKIRAN	Sangat Rendah	2	05-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	KECAMATAN KADIPATEN	Sangat Rendah	2	07-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	KECAMATAN DAWUAN	Sangat Rendah	2	12-04-2021 s/d 13-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	KECAMATAN KASOKANDEL	Sangat Rendah	2	14-04-2021 s/d 15-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	KECAMATAN KERTAJATI	Sangat Rendah	2	19-04-2021 s/d 20-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	KECAMATAN JATITJUH	Sangat Rendah	2	21-04-2021 s/d 22-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	KECAMATAN SINDANGWANGI	Sangat Rendah	2	05-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	KECAMATAN RAJAGALUH	Sangat Rendah	2	07-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	KECAMATAN LEUWIMUNDING	Sangat Rendah	2	12-04-2021 s/d 13-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	KECAMATAN PALASAH	Sangat Rendah	2	14-04-2021 s/d 15-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	KECAMATAN SUMBERJAYA	Sangat Rendah	2	19-04-2021 s/d 20-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	KECAMATAN LIGUNG	Sangat Rendah	2	21-04-2021 s/d 22-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	KECAMATAN JATIWANGI	Sangat Rendah	2	26-01-2021 s/d 27-01-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	KECAMATAN BANJARAN	Sangat Rendah	2	05-04-2021 s/d 06-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	KECAMATAN ARGAPURA	Sangat Rendah	2	07-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	KECAMATAN MAJA	Sangat Rendah	2	12-04-2021 s/d 13-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	KECAMATAN SINDANG	Sangat Rendah	2	14-04-2021 s/d 15-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	KECAMATAN SUKAHAJI	Sangat Rendah	2	19-04-2021 s/d 20-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	KECAMATAN CIGASONG	Sedang	5	21 April 2021 s/d 28 April 2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	KECAMATAN MAJALENGKA	Sedang	5	29 April 2021 s/d 6 Mei 2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	KECAMATAN LEMAHSUGIH	Sangat Rendah	2	05-04-2021 s/d 06-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	KECAMATAN BANTARUJEG	Sangat Rendah	2	07-04-2021 s/d 08-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	KECAMATAN MALAUSMA	Sangat Rendah	2	12-04-2021 s/d 13-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	KECAMATAN CINGAMBUL	Sangat Rendah	2	14-04-2021 s/d 15-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	KECAMATAN CIKIJING	Sangat Rendah	2	19-04-2021 s/d 20-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	KECAMATAN TALAGA	Sangat Rendah	2	21-04-2021 s/d 22-04-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No.	Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Satker/Perusda	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	BADAN USAHA MILIK DAERAH									
1	PD SINDANGKASIH MULTI USAHA	Rendah	3	19-08-2021 s/d 24-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	PDAM MAJALENGKA	Sedang	4	23-08-2021 s/d 26-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	PERUMDA SILIH ASIH	Sedang	4	04-08-2021 s/d 11-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	BPR MAJALENGKA	Rendah	3	19-08-2021 s/d 24-08-2021	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI